

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pertumbuhan aset Pemerintah Kota Kupang. Pada aset lancar pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar -4,36%, lalu naik pada tahun 2023 sebesar 6,73%. Investasi jangka panjang terus tumbuh, pada tahun 2022 sebesar 5,49% dan padatahun 2023 sebesar 7,24%. Aset tetap pada tahun 2022 naik sebesar 10,60% sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar -0,42%. Pada aset lainnya pada tahun 2022 sebesar 10,57% dan sedikit meningkat pada tahun 2023 sebesar 2,68%. Properti investasi hadir pada aset Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2023. Pada total aset mengalami kenaikan pertumbuhan secara konsisten, pada tahun 2022 sebesar 9,73% dan ditahun 2023 sebesar 0,43%, maka analisis pertumbuhan aset tahun 2021 sampai tahun 2023 secara umum menunjukkan sinyal positif,
2. Proporsi aset terhadap total aset Pemerintah Kota Kupang yang paling mendominasi adalah aset tetap. Komposisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekayaan yang dominan dalam bentuk aset jangka panjang seperti tanah, gedung, dan infrastruktur, sementara aset yang lebih likuid seperti kas dan piutang relatif kecil. Dengan kondisi ini, pemerintah tergolong *illiquid*, namun jika aset tetap dikelola dan dimanfaatkan secara baik maka akan dapat meningkatkan perekonomian Pemerintah Daerah.

3. Analisis modal kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang menunjukkan hal positif dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2021 sebesar Rp 90.998.777.833,83, pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp 97.215.406.158,69, dan pada tahun 2023 sebesar Rp.99.469.623.409,55, dan hasil analisis memberikan angka positif atau lebih dari Rp0. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami tekanan likuiditas yang signifikan.
4. Analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang berada dalam keadaan yang sangat baik. Rasio likuiditas untuk rasio lancar mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 sebesar 5,99, di tahun 2022 sebesar 14,37, dan pada tahun 2023 sebesar 9,26, namun tetap jauh di atas standar aman 2:1. Rasio cepat, rasio kas dan rasio modal kerja terhadap total aset juga menunjukkan peningkatan yang serupa dan tetap berada di atas batas minimal, yang mencerminkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas juga sangat tinggi, meningkat pada tahun 2021 sebesar 152,35 di tahun 2022 sebesar 419,50, kemudian pada tahun 2023 sebesar 254,31, namun tetap mencerminkan kemampuan luar biasa dalam menjamin seluruh kewajiban. Pada rasio utang terhadap ekuitas dan aset modal, nilainya sangat rendah selama tiga tahun berturut-turut di bawah 1:1, yang menandakan ketergantungan terhadap utang sangat kecil dan struktur keuangan daerah sangat kuat. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kota

Kupang sangat mampu mengatasi kewajiban yang dimiliki, ditinjau dari rasio keuangan yang dihasilkan.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang disarankan untuk terus memperkuat pengelolaan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pertumbuhan aset yang positif perlu dijaga melalui perencanaan yang baik, pengawasan yang ketat, dan pemanfaatan aset yang lebih optimal. Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta menjaga keseimbangan antar aset, agar kebutuhan operasional jangka pendek dapat terpenuhi tanpa hambatan. Selain itu, fluktuasi yang terjadi pada beberapa komponen aset perlu direspons dengan strategi pengelolaan yang baik, serta juga mendata aset yang menganggur dan mengupayakan pemanfaatannya secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, dan dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat menciptakan struktur aset yang baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya fokus pada analisis kuantitatif dari laporan keuangan, tetapi juga menggabungkannya dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara atau observasi langsung guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan aset daerah atau kinerja aset daerah. Selain itu, memperluas cakupan penelitian ke beberapa tahun anggaran, maka akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset serta kinerja aset oleh pemerintah daerah.